Peran Ilmu Perundang-Undangan dalam Membangun Sistem Hukum yang Adil

Saqinah Aifi Kirmala¹, Anastasya Sembiring², Fatma Angraini Lubis³, Arini Rehulina Br surbakti⁴, Solavide Ginting⁵, Ramsul Nababan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

e-mail: saifikirmala@gmail.com¹, anastasyasembiring0@gmail.com²,
fatmaangrainilubis@gmail.com³, arinisurbakti340@gmail.com⁴,
solavideginting76@gmail.com⁵, ramsulyandinbbn@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ilmu perundang-undangan dalam membangun sistem hukum yang adil di Indonesia. Dalam konteks meningkatnya kompleksitas sosial, budaya, dan ekonomi, pemahaman yang kuat terhadap peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik. Selain itu, analisis terhadap yurisprudensi menunjukkan bahwa yurisprudensi berfungsi sebagai pedoman bagi hakim, meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti perbedaan interpretasi. Lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum-hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam menciptakan sistem hukum yang efektif. Pembangunan hukum harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, memperkuat demokrasi, dan memastikan keadilan yang inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk analisis. Diharapkan, kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dapat menghasilkan regulasi yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi.

Kata Kunci: *Ilmu Perundang-Undangan, Sistem Hukum, Keadilan Sosial, Yurisprudensi, Partisipasi Masyarakat.*

Abstract

This research aims to determine the role of legislative science in building a just legal system in Indonesia. In the context of increasing social, cultural and economic complexity, a solid understanding of legislation is crucial to achieving social justice and the protection of human rights. This research emphasizes the importance of public participation in the legislative process to ensure that laws reflect the needs and aspirations of the public. In addition, an analysis of jurisprudence shows that jurisprudence serves as a guide for judges, despite challenges in its application, such as differences in interpretation. Five factors affecting law enforcement-the law, law enforcers, facilities, society, and culture-were identified as key elements in creating an effective legal system. Legal development should be directed towards achieving prosperity, strengthening democracy, and ensuring inclusive justice. The research method used is qualitative with a literature study approach, aiming to collect relevant information for analysis. Hopefully, collaboration between the government, law enforcement, and the community can produce regulations that uphold justice and transparency.

Keywords: *Legislative Science, Legal System, Social Justice, Jurisprudence, Community Participation.*

PENDAHULUAN

Yurisprudensi memegang peranan yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan sistem hukum yang adil dalam suatu negara, seperti menciptakan keadilan, kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Di Indonesia, dengan semakin meningkatnya kompleksitas sosial, budaya, dan ekonomi, peran pengetahuan perundang-undangan menjadi syarat mutlak untuk menciptakan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak efektifnya penegakan hukum seringkali menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum. Selain mengatur perilaku masyarakat, hukum yang adil juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat.

Pembangunan hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari praktik korupsi dan penegakan hukum yang tidak adil hingga kesenjangan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu penting untuk menilai sejauh mana ilmu perundang-undangan berkontribusi terhadap penciptaan dan penguatan sistem hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlu juga dikaji bagaimana proses legislasi dapat dilakukan secara transparan dan partisipatif agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kasus-kasus ilegal dan tidak adil yang menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya dan tuntutan transparansi proses hukum yang terus meningkat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem hukum yang lebih adil.

Penerapan ilmu perundang-undangan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Yurisprudensi tidak hanya melibatkan penyusunan peraturan tetapi juga analisis kritis terhadap penerapan hukum dalam praktik. Materi yang mendukung pentingnya penafsiran hukum yang adil dan konsisten serta pendekatan inklusif dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam analisis kritis terhadap penerapan hukum pidana normatif di Indonesia, yang menyoroti perlunya reformasi untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem peradilan. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dapat meningkatkan legitimasi dan keadilan hukum, sehingga membantu meminimalkan potensi konflik dan mengembangkan undang-undang yang lebih sesuai bagi masyarakat.

Keberhasilan sistem hukum yang adil sangat bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan dan implementasinya. Ketidakpastian hukum seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan, serta pentingnya menyertakan suara dan keinginan masyarakat dalam proses legislasi untuk menciptakan undang-undang yang lebih relevan dan efektif. Pendidikan hukum penting bagi masyarakat karena meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam konteks hukum. Hal ini juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya menaati hukum dan menghormati prosedur hukum yang berlaku.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran ilmu legislasi dalam mewujudkan sistem hukum yang adil di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum agar lebih responsif dan inklusif. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu pembangunan kebijakan hukum yang lebih baik di masa depan.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu, penelitian dengan mengumpulkan informasi dari buku dan jurnal. studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian. teori permasalahan dan, bidang yang akan diteliti dapat ditemukan melalui penelitian kepustakaan. Selain itu, peneliti bisa menerima atau memperoleh informasi tentang penelitian yang serupa atau terkait dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya melalui penelitian kepustakaan jenis kualitatif memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih

di tonjalkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori yang di dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Burkhardt Kreams, ilmu pengetahuan perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Secara harfiah perundang-undangan berasal dari istilah “undang-undang”, dengan awalan “per” dan akhiran “an”. Imbuhan per-an menunjukkan arti dari segala hal yang berhubungan dengan undang-undang. Dalam arti lain Peraturan Perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hukum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Istilah yurisprudensi di Indonesia dapat dibedakan dengan istilah *Jurisprudence* dalam bahasa Inggris yang berarti ilmu hukum. Istilah yurisprudensi dalam pengertian hukum di Indonesia dapat disamakan dengan *jurisprudentie* di Belanda atau istilah serupa dalam bahasa Perancis yaitu *jurisprudence*. Mahadi menguraikan arti yurisprudensi bukan keputusan-keputusan hakim, bukan pula sebagai “rentetan-rentetan” keputusan, melainkan hukum yang terbentuk dari keputusan-keputusan hakim. Yurisprudensi dihasilkan oleh hakim Mahkamah Agung ketika mereka menghadapi perkara yang landasan hukumnya tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Yurisprudensi sangat penting dalam sistem peradilan yang dimana undang-undang atau sumber hukum lainnya tidak dapat memberikan solusi yang jelas, hakim dapat merujuk pada putusan-putusan sebelumnya, yurisprudensi berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menafsirkan hukum, serta memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pemahaman individual tetapi juga selaras dengan interpretasi hukum. Yurisprudensi memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai salah satu sumber hukum yang membantu membentuk dan mengembangkan pemahaman hukum yang konsisten. Dalam penerapan yurisprudensi seringkali memiliki hambatan yang dimana memilikim perbedaan interpretasi di antara hakim dan kurangnya komunikasi yang efektif di antara mereka. Perkembangan sosial dan budaya yang cepat sering kali menyebabkan ketidakselarasan antara yurisprudensi dan kondisi masyarakat saat ini. Dalam hal ini tentu nya memerlukan penerapan yurisprudensi yang harus melibatkan reformasi hukum yang menyesuaikan aturan dengan realitas masyarakat serta peningkatan komunikasi dan koordinasi di antara hakim. Pembaharuan hukum yang melibatkan unifikasi dan kodifikasi dapat membantu mengatasi disparitas dan memastikan bahwa yurisprudensi diterapkan secara konsisten. Pendekatan ini akan memungkinkan sistem hukum untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial dan budaya, serta lebih efektif dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum (Nahrowi, 2024).

Indonesia pada saat ini dimana mengalami multi krisis salah satunya adalah krisis dalam penegakan hukum. Penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum dengan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Tantangan dalam menegakkan hukum keadilan di Indonesia sering kali terjadi karena adanya korupsi. Korupsi merusak integritas sistem hukum, memengaruhi keputusan hukum, dan menciptakan ketidakadilan. ketidakmerataan akses terhadap sistem peradilan, dan lambannya proses peradilan di Indonesia. Dalam hal ini perlunya penanggulangan korupsi dalam sistem hukum harus menjadi prioritas utama. Memperbaiki akses terhadap sistem peradilan terutama di daerah terpencil, banyak masyarakat terutama didaerah terpencil menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan. Hal ini tentunya memerlukan reformasi dalam administrasi peradilan, termasuk penggunaan teknologi yang lebih canggih, dapat membantu mempercepat proses peradilan tanpa mengorbankan keadilan, sehingga sistem hukum di Indonesia dapat lebih adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ketika sistem hukum mampu menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan kebermanfaatn, maka masyarakat akan merasa lebih percaya terhadap hukum sebagai fondasi negara. Hal itu tentunya tidak akan hanya mendukung stabilitas sosial, tetapi juga memperkuat demokrasi dan mendorong perkembangan negara secara keseluruhan (Nabila, 2023).

Dalam proses penegak hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Hukum; Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat.
2. Penegak hukum; Hukum sangat dipengaruhi oleh kepribadian dari penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.
3. Sarana dan fasilitas; Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.
4. Masyarakat; Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.
5. Kebudayaan; Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Dari kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting di dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum, yang dimana masyarakat merupakan suatu subjek sekaligus objek dalam penerapan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Arah pembangunan di bidang perundang-undangan sebagai berikut. Pertama, melanjutkan pembangunan untuk mencapai Indonesia sejahtera. Kedua, memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiga, memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan pengurangan kesenjangan gender. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat diperlukan politik perundangundangan yang menjadi landasan dan arah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Sangat penting untuk menekankan betapa pentingnya ilmu perundang-undangan dalam membangun sistem hukum yang adil di Indonesia. Sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip

hukum dan berpartisipasi aktif dalam proses legislasi dalam menghadapi tantangan sosial, budaya, dan ekonomi yang terus berkembang. Kita dapat membuat regulasi yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Sistem hukum yang lebih baik dan inklusif akan muncul sebagai hasil dari perbaikan teori dan praktik hukum serta peningkatan pendidikan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia dapat dicapai, memperkuat dasar demokrasi, dan menghasilkan masyarakat yang lebih sejahtera dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- DM, M. Y., Sugianto, S., Pangaribuan, R. L., Utama, A. W. P., & Saragih, G. M. (2022). Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. *JPI: Jurnal Pendidik Indonesia*, 5(2), 176-184.
- Fadhriansyah, H. (2024). Analisis Kritis atas Implementasi Hukum Pidana Normatif dalam sistem Peradilan Indonesia. *Sumbang 12 Journal*, 2, 44.
- Hidayati, A. N., & Qur'ani, E. R. (2023). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mewujudkan Penegakan Hukum di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(1), 21–29.
- Moonti, R. M. (2017). *Ilmu Perundang-undangan*. Makassar: Keretakupa.
- Nabila, M. (2023). Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Volume 7 Nomor 1, 127-133.
- Nahrowi. (2024). Inamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legisla*, Volume 16 Nomor 2, 48-62.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Sembiring, T., Ramadhani, K. N., Prasiska, G., Siahaan, R. Y., Nisa, C., Nababan, R., & Ibrahim, M. (2024). Analisis Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Suatu Undang-Undang. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(1), 17–24.
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, volume 16, no 1, 84-104.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Wijayanti, W. (2013). Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 179-204